

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Korea Selatan terletak di Benua Asia Timur tepatnya di bagian selatan Semenanjung Korea dengan garis Lintang Utara 33° - 38° dan 124° - 132° Bujur Barat. Negara ini berbatasan dengan Laut Kuning di bagian selatan. Korea Selatan memiliki luas 99.274 km^2 lebih kecil dibandingkan dengan Korea Utara. Kondisi topografi Korea Selatan terdiri dari sebagian besar perbukitan dan pegunungan. Pada umumnya, pegunungan tersebut berada di bagian timur menjadi hulu sungai-sungai besar seperti sungai Han dan sungai Naktong. Sedangkan di bagian barat terdapat bagian yang rendah terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di bagian barat dan selatan ini terdapat banyak teluk dan pelabuhan, seperti pelabuhan Incheon, Yeosu, Busan, dan Gimhae (Rachmawati, 2017).

Korea Selatan memiliki kurang lebih 3000 pulau yang sebagian besarnya merupakan pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut tersebar mulai dari bagian barat hingga selatan negara Korea Selatan. Titik tertinggi Korea Selatan terletak di Gunung Halla yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jeju dengan ketinggian mencapai 6.398 kaki atau setara dengan 1.950 meter. Korea selatan memiliki iklim yang bersifat iklim benua dan iklim samudra dimana perubahan 4 jenis musim di negara ini sangat jelas. Musim panas di Korea Selatan dimulai dari bulan Juni dan suhunya dapat mencapai sekitar 40 derajat celcius di kota Daegu. Sedangkan temperatur musim dinginnya rata-rata bisa mencapai suhu sejauh minus 10 derajat celcius di beberapa wilayah. Pada musim dingin ini masyarakat Korea Selatan bisa menikmati olahraga pariwisata salju karena di kawasan pegunungan daerah timur salju

yang turun cukup banyak sehingga daerah permainan ski dan kawasan papasan luncur salju dapat dinikmati pada musim ini (Briney, 2019).

Menurut survei *Central Intelligence Agency* (CIA), Korea Selatan merupakan negara yang memiliki populasi sebesar 51.418.097 pada Juli 2018. Mayoritas penduduk di Korea Selatan memeluk agama Buddha, Kristen Protestan, Katolik Roma, Cheondisme dan Konfusius dengan total pemeluk agama berkisar 43.1% yang terdiri dari Buddha 15.5%, Kristen Protestan 19.7%, Katolik 7.9% dan 56.9% yang tidak memeluk agama (The World Factbook, 2019). Agama Islam masih menjadi minoritas di Korea Selatan tetapi agama ini sudah berkembang dengan baik dari waktu ke waktu. Banyak tenaga kerja di Korea Selatan yang memeluk agama Islam karena mereka merupakan tenaga kerja yang pernah merantau ke negara-negara Timur Tengah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, seperti Uni Emirat Arab. Berkembangnya agama Islam di Korea Selatan ini merupakan suatu keuntungan untuk pemerintah Korea Selatan karena terjalinnya hubungan internasional Korea Selatan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Saat ini, Korea Selatan merupakan negara maju di kawasan Asia Timur yang bersaing dengan Amerika Serikat, China dan Jepang dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan maupun politiknya yang kini telah berhasil memajukan pariwisatanya. Kemajuan ini membuat negara lain di dunia memiliki keinginan untuk menjalin hubungan baik dan kerja sama yang erat dengan Korea Selatan. Keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam memajukan pariwisatanya salah satunya adalah negara ini berhasil mempengaruhi negara-negara lain melalui promosinya mengenai *Korean Wave* atau yang akrab disebut sebagai *Hallyu* terhadap masyarakat dunia internasional. Promosi *Korean Wave* ini dimulai sejak banyak artis-artis dan produk-produk dari Korea Selatan yang masuk ke wilayah Tionghoa kemudian

menyebar ke kawasan Asia Timur, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan beberapa di daerah Eropa pada tahun 1990. Bentuk-bentuk *Korean Wave* ini seperti *K-pop music*, *K-drama*, *K-film*, dan *K-fashion*. Perkembangan produk-produk hasil dari budaya Korea Selatan tersebut diakui sebagai instrument bagi Korea Selatan dalam memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat dunia internasional dan juga sebagai acuan bagi negara-negara dunia ketiga dalam meningkatkan potensi pariwisata dalam negeri. Dengan berjalannya waktu, kesuksesan *Korean Wave* sudah semakin merambah ke berbagai negara seperti China, Jepang, Thailand dan juga berbagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim seperti negara-negara di Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia (J, 2013).

Dewasa ini, pariwisata menjadi sektor yang memiliki arti penting bagi suatu negara karena mampu memberikan keuntungan dalam segala bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pariwisata juga merupakan sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cepat dengan cara menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke negara tersebut. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mengedepankan sektor pariwisata untuk wisatawan asing. Total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Korea Selatan memiliki organisasi yang bergerak di bidang pariwisata yaitu *Korea Tourism Organization* (KTO) dimana organisasi tersebut naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada awal tahun 2016, Korea Selatan mengalami kemerosotan pendapatan terutama di sektor pariwisatanya. Penyebabnya adalah Korea Selatan kehilangan wisatawan yang berasal dari China. Perginya wisatawan China tersebut didasari oleh pemerintah China yang tidak setuju dengan adanya kerja sama pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah Amerika Serikat dalam hal membangun instalasi *Terminal*

High Altitude Area Defense (THAAD). Menurut pemerintah China, hal tersebut akan mengganggu kepentingan keamanan regionalnya dan juga mereka berasumsi bahwa THAAD merupakan upaya untuk melemahkan kepentingan strategi China dan bisa digunakan untuk memata-matai China. Akibat dari adanya kerja sama antara pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Amerika Serikat, pemerintah China mulai membatalkan beberapa pertemuan pemerintah yang sebelumnya sudah diagendakan. Selain itu, pemerintah China juga memberikan batasan-batasan dan boikot secara sepihak terhadap usaha bisnis, melarang biro wisata berkunjung ke Korea Selatan, dan melarang masuknya hiburan dan industri mobil dari Korea Selatan. Dalam bidang pariwisata, pemerintah China memberikan beberapa kebijakan seperti mengurangi jumlah wisatawan China ke Korea Selatan sebesar 20% dan terbitnya edaran 7 garis panduan bepergian oleh *China National Tourism Administration (CNTA)* yang mengakibatkan jumlah wisatawan China ke Korea Selatan mengalami penurunan drastis pada bulan Maret 2017 sebesar 40%.

Perginya wisatawan-wisatawan China tersebut membuat pemerintah Korea Selatan harus memutar pikiran supaya pendapatannya terutama di bidang pariwisata tidak terpuruk terlalu lama. Seperti yang diketahui bahwa, dimulai dari tahun 2015 sudah banyak wisatawan Muslim yang berkunjung ke Korea Selatan untuk menikmati destinasi-destinasi wisatanya. Dengan begitu, pemerintah Korea Selatan bertekad untuk fokus menyoar kepada wisatawan-wisatawan Muslim dari seluruh dunia. Melihat industri pariwisata Muslim sedang gencar di berbagai negara. Dengan menyoar pasar Muslim, Korea Selatan pun harus bersiap. Untuk menarik wisatawan Muslim, Korea Selatan perlu secara efektif dan efisien serta cepat dalam menyiapkan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik para wisatawan Muslim. Selain itu, wisatawan Muslim juga tidak makan daging babi ataupun mengonsumsi alkohol. Adanya

kebutuhan menyediakan restoran halal yang menyajikan makanan berdasarkan peraturan Syariah Islam sangat diperlukan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi masalah tersebut dan juga untuk mengembangkan pariwisatanya adalah melalui peningkatan diplomasi publik yaitu memanfaatkan potensi kuliner sebagai bagian dari kebudayaan dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung Muslim berkunjung ke Korea Selatan serta menarik investor asing terutama dari negara-negara Timur Tengah agar mau menanamkan modalnya sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut *Korea Tourism Organization* (KTO), pada tahun 2015, pengunjung dari 12 negara yang sangat populer di dunia seperti China, Jepang, Taiwan, Amerika Serikat, Hong Kong, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Russia, Indonesia, dan Singapura bertotal 13.231.651 wisatawan. Sedangkan tahun 2016, total wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan mengalami peningkatan sebesar 30% sehingga mencapai 17.241.823 wisatawan. Di antara wisatawan asing ini, terdapat 740.000 wisatawan Muslim pada tahun 2015 dan 810.000 wisatawan Muslim pada tahun 2016 yang berkunjung ke Korea Selatan (Organization, 2017). Perkembangan wisatawan asing terutama wisatawan Muslim yang cukup pesat ini membuat pemerintah Korea Selatan mulai menyadari dan peduli akan pentingnya pariwisata yang menyediakan fasilitas ramah Muslim dan makanan halal untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan Muslim yang datang ke Korea Selatan serta memperluas pangsa pasar ke negara-negara Muslim. Dengan begitu, pemerintah Korea Selatan memiliki potensi yang tinggi untuk dapat memasuki pangsa pasar halal dunia melalui kerjasama dengan negara Muslim karena dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah Korea Selatan itu sendiri yakni meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata dan ekspor

makanan Korea. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga berencana untuk membuat kebijakan fasilitas-fasilitas ramah Muslim seperti akan dibangun masjid-masjid dan restoran-restoran halal dengan tujuan untuk menarik pengunjung Muslim berkunjung ke Korea Selatan.

Bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan halal, hal itu akan menjadi membingungkan. Karena itu, perlu dijelaskan secara singkat definisi kata 'halal'. Pada dasarnya, dalam bahasa Arab, kata 'halal' berarti diizinkan dan juga biasanya digunakan sebagai pedoman berdasarkan hukum Islam. Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diperbolehkan atau dilarang dan melanggar hukum. Halal sering terkait dengan makanan dan minuman yang diperbolehkan dan dikonsumsi oleh umat Muslim. Namun, halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman tetapi juga mencakup banyak hal seperti kosmetik, obat-obatan dan aspek lain dari cara hidup dan perilaku umat Muslim (Ismail & Battour, 2015).

Di era sekarang, industri halal memang sedang menjadi tren di kalangan internasional terutama dalam industri pariwisata. Bahkan, industri pariwisata halal ini merupakan salah satu sektor pariwisata yang menjadi sumber ekonomi baru bagi beberapa negara di dunia karena industri halal saat ini merupakan sebuah konsep baru di dalam dunia perbisnisan. Selain diterapkan pada negara-negara mayoritas penduduk Muslim, perkembangan industri halal ini terbilang cukup pesat di negara mayoritas non-Muslim seperti Singapura, Thailand, Jepang, dan lain-lain. Pariwisata halal ini memang merupakan konsep pengembangan tujuan destinasi wisata yang akan memberikan kenyamanan dan fasilitas terhadap masyarakat yang beragama Muslim tanpa memberikan kerugian kepada wisatawan non-Muslim (Kusumaningrum, Fairuz, & dkk, 2017).

Pada dasarnya, industri pariwisata halal (*halal tourism*) hampir sama dengan pariwisata pada umumnya. Hanya saja, pariwisata halal tersebut adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk para pengunjung Muslim dimana fasilitas yang diberikan harus sesuai dengan aturan Islam (syariah Islam). Bentuk-bentuk fasilitas tersebut ialah seperti restoran atau warung makan yang sudah mempunyai sertifikat halal dari lembaga-lembaga sertifikasi halal dan tidak mengandung daging babi sebagai bahan pokok makanannya, tidak mengandung alkohol, bahan makannya mengandung daging sapi dan ayam dimana penyembelihannya sudah sesuai menurut ajaran dalam agama Islam, serta menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melakukan ibadah. Berikut adalah definisi dari pariwisata halal (*halal tourism*) menurut beberapa penulis:

Tabel 1.1 Definisi Pariwisata Halal (*Halal Tourism*) Menurut Beberapa Penulis

Penulis	Definisi
Halbase (2015)	Pariwisata halal merupakan pariwisata yang memberikan penawaran dalam bentuk paket wisata dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim.
Battour dan Ismail (2016)	Kegiatan wisata yang diizinkan atau diperbolehkan menurut ajaran dan syariah agama Islam.
Mohsin <i>et al.</i> (2016)	Pariwisata yang menyediakan produk dan fasilitas dimana kebutuhan wisatawan Muslim harus terpenuhi sesuai yang diajarkan dalam agama Islam.

Sumber: Journal of Halal Product and Research (JHPR)

Selain itu, industri halal merupakan pasar terbesar dalam industri makanan dimana makanan halal telah dikonsumsi mencapai hampir 2 juta orang dari 25% total

populasi di dunia (Mas'oe'd, 1990). Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, makanan halal didefinisikan sebagai makanan yang diizinkan oleh Hukum Islam dan harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Hukum Islam, misalnya, makanan halal tidak mengandung apa pun yang dianggap melanggar hukum berdasarkan Hukum Islam. Maka dari itu, untuk dapat menghindari makanan yang mengandung zat haram, masyarakat Muslim harus mengonsumsi produk-produk makanan dan minuman yang bersertifikasi “halal” (Miskam N. O., 2015).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Korea Selatan saat ini menganggap pariwisata halal ini merupakan peluang yang besar terhadap pasar Muslim di dunia dimana pemerintah Korea Selatan akan mendapatkan pemasukan yang besar jika mereka bisa bekerjasama dengan negara-negara Muslim. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Korea Selatan akan dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Peningkatan cadangan devisa Korea Selatan secara signifikan ditandai dengan adanya peningkatan wisatawan Muslim yang berkunjung ke Korea Selatan yang berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti negara-negara di Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat cadangan devisa negara Korea Selatan sebesar USD 392.8 Milyar. Diperkirakan pada tahun 2020, pengunjung Muslim yang datang ke Korea Selatan meningkat sebesar 1.9 miliar (Halal Market Size, 2018). Dari tahun ke tahun, peningkatan wisatawan Muslim yang berkunjung ke Korea Selatan sangat memberikan keuntungan kepada negara tersebut karena perekonomiannya semakin meningkat dan stabil. Selain itu, ekspor makanan-makanan dari Korea Selatan juga sangat diminati oleh negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia.

Kini, pemerintah Korea Selatan fokus terhadap wisatawan Muslim dari negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah yang mana negara-negara tersebut mayoritas penduduknya adalah Muslim. Fokus pemerintah negara tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim selama berkunjung ke Korea Selatan, seperti menyediakan fasilitas-fasilitas ramah Muslim. Keseriusan pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan industri pariwisata halalnya terbukti dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan lembaga-lembaga yang menyediakan sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga memperhatikan penerapan prinsip-prinsip *syariah* di bidang pariwisata, termasuk standar makanan halal. Dalam hal makanan halal ini, pemerintah Korea Selatan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab dalam ekspor-impor makanan halal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibentuk rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan industri pariwisata halal pada tahun 2015-2020?

C. Kerangka Pemikiran

1. Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, peran negara sebagai aktor pengambil keputusan dan memainkan peran penting dalam afiliasi internasional memberikan pengaruh terhadap orang-orang di suatu negara. Kepentingan nasional diciptakan dari kebutuhan suatu negara. Ketertarikan dalam kebutuhan

suatu negara dapat dilihat dari kondisi internal, baik dari kondisi ekonomi, politik, militer, dan sosial budaya. Peran suatu negara dalam menyediakan bahan sebagai dasar kepentingan nasional tidak dapat disangkal menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sebagai negara yang memiliki hubungan terlampir dengan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku-perilaku kebijakan luar negeri dari suatu negara.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan melestarikan identitas fisik, politik dan budaya dari negara lain. Dalam buku Miroslav Micnic (1999) yang berjudul “Kepentingan Nasional dan Interpretasinya”, Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional sama dengan upaya negara untuk mengejar sebuah kekuasaan dimana kekuasaan tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan mempertahankan kontrol suatu negara atas negara lain. Selain itu, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing negara dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya dimana kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam keadaan kepentingan yang berbeda. Kepentingan nasional biasanya ditemukan dalam setiap konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas di negaranya (Morgenthau, 1978).

Di sisi lain, seperti yang dijelaskan oleh Kindleberger (2011) tentang kepentingan nasional adalah “kepentingan nasional merupakan hubungan antara negara-negara yang dibuat karena perbedaan dalam keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam produksi. Keunggulan komparatif seperti itu membuka peluang untuk spesialisasi yang masing-masing negara

pilih untuk mendukung pembangunan nasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya”. Pemahaman ini menjelaskan bahwa keragaman setiap negara di dunia memiliki kapasitas yang berbeda-beda sehingga negara-negara tersebut ingin menjalin kerjasama dengan melihat kondisi yang dapat dipertimbangkan. Implementasi kepentingan nasional tersebut dapat berupa kerjasama bilateral atau multilateral tergantung pada kebutuhan masing-masing negara.

Terdapat beberapa aspek dalam kepentingan nasional yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi suatu negara dalam mencari kepentingan nasionalnya (Fransisca, 2016). Aspek-aspek tersebut antara lain:

a. Aspek kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari suatu negara. Selain itu, kepentingan ekonomi juga merupakan kepentingan yang paling mendasar karena ekonomi baik atau buruk suatu negara akan mempengaruhi kualitas hidup suatu negara secara keseluruhan.

b. Aspek kepentingan sosial dan budaya

Kepentingan sosial dan budaya memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan ekonomi karena sosial dan budaya merupakan identitas individu yang dimiliki oleh setiap bangsa. Sehingga kualitas hidup yang baik atau buruk suatu negara sangat memiliki pengaruh dengan budaya asli yang mereka miliki.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan strategi-strategi yang telah direncanakan dan dikembangkan oleh para pengambil keputusan dari suatu negara tersebut terhadap negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik

untuk kepentingan nasionalnya. Walaupun tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda dimana secara umum tujuannya adalah tentang kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer, dan ekonomi.

Kepentingan nasional pemerintah Korea Selatan yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan perekonomiannya. Berkembangnya industri pariwisata terutama pada industri pariwisata halal membuat pemerintah Korea Selatan memprediksi bahwa peningkatan industri pariwisata mereka dapat mempengaruhi total wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan mengalami peningkatan. Semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan, semakin meningkat pula pendapatan ekonomi yang diterima oleh pemerintah Korea Selatan. Para wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan sebagian besar juga merupakan wisatawan Muslim. Dengan keberadaan wisatawan Muslim, pemerintah Korea Selatan semakin berusaha untuk meningkatkan industri pariwisata halal dengan tujuan di masa depan, pendapatan ekonomi negara Korea Selatan akan terus meningkat.

2. Kerjasama Internasional

Dalam aspek Hubungan Internasional, kerja sama internasional merupakan berbagai macam kepentingan dari berbagai negara yang tidak dapat dipenuhi negaranya sendiri. Kerja sama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional. Isu utama dari kerja sama internasional adalah seberapa banyak keuntungan yang didapatkan melalui kerja sama tersebut dapat menjadi pendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerja sama internasional tercipta dengan adanya kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan (Dougherty & Robert L. Pfaltze

graff, 1986). Kerja sama internasional fokus kepada studi yang mempelajari tentang penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerja sama. Kerja sama merupakan hubungan-hubungan yang tidak didasari oleh paksaan ataupun kekerasan dan disahkan secara hukum. Kerja sama dapat terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan yang diambil oleh aktor lain.

Selain itu, kerja sama dapat terjadi juga karena adanya sebuah komitmen yang tercipta oleh masing-masing aktor yang memiliki tujuan berupa kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Kunci utama dari bekerja sama adalah sejauh mana setiap aktor mempercayai bahwa aktor lainnya juga akan bekerja sama. Isu utama dari teori kerja sama adalah adanya suatu usaha untuk memenuhi kepentingan pribadi yang hasilnya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Holsti berpendapat bahwa awal mula adanya kerja sama adalah karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian yang lebih dari suatu negara yang dimana masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan memberikan sebuah saran ataupun pendapat untuk dapat menyelesaikan masalah bisa melalui cara tawar-menawar, mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu saran yang lainnya, dan diakhiri dengan perundingan yang menghasilkan suatu perjanjian yang mana dapat memuaskan dan menguntungkan semua pihak (Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, 1997).

Adapun beberapa definisi kerja sama menurut Holsti, yaitu:

1. Adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan ataupun dipenuhi oleh semua pihak.
2. Adanya persetujuan atas suatu masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Kerja sama menimbulkan suatu harapan negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya dapat membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Adanya aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah persetujuan.
5. Transaksi dua negara atau lebih untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dalam suatu kerja sama internasional akan bertemu dengan berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara yang tidak dapat dipenuhi oleh negaranya sendiri. Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan Administrasi Internasional menyebutkan bahwa kerja sama internasional tidak dapat dihindari oleh suatu negara karena adanya sebuah keharusan yang diakibatkan oleh suatu ketergantungan di antara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks dan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh aktor-aktor tersebut. Kerja sama internasional juga terjadi karena adanya pemahaman nasional serta memiliki tujuan yang sama dan keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong

terjadinya kerja sama internasional seperti kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan adanya kemudahan dalam berkomunikasi sehingga suatu negara dapat meningkatkan ketergantungan satu sama lain, kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan suatu negara, adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam pemecahan masalah, dan adanya perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri (Kartasasmita, 1997).

Kerja sama internasional memiliki 3 tingkatan sebagai berikut (Smith & Hocking, 1990):

1. Konsensus, suatu tingkatan yang ditandai oleh adanya sejumlah ketidakhirauan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, suatu tingkatan lebih tinggi dari konsensus yang ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan dan saling bekerja sama yang aktif di antara negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, suatu kerja sama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi di antara negara-negara yang terlibat dan jarang sekali terjadinya benturan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat.

Kerja sama internasional antar negara memiliki ruang lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui berbagai kerja sama multidimensi seperti ekonomi, sosial, dan politik. Kerja sama tersebut kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan dengan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk dapat menjalin kerja sama dalam beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan yang lainnya (Plano & Olton, 1999).

Terdapat beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan kerja sama dengan negara lainnya (Holsti, 1995):

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan individual suatu negara yang memberikan dampak terhadap negara lain.

Pemerintah Korea Selatan memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim di Korea Selatan, sehingga pemerintah Korea Selatan mengajukan kerja sama internasional kepada beberapa negara-negara mayoritas Muslim di dunia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan United Emirates Arab untuk dapat bekerja sama dalam hal sertifikasi halal makanan maupun restoran-restoran yang ada di Korea Selatan.

D. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan diatas strategi dan kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan industri halal melalui industri pariwisata halal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia sertifikat halal.
2. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara mayoritas penduduknya Muslim seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia.
3. Meningkatkan pelayanan fasilitas-fasilitas ramah Muslim di setiap tempat wisata yang ada di Korea Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan melalui skripsi ini, antara lain adalah:

1. Mengetahui perkembangan industri pariwisata halal di Korea Selatan guna menarik minat wisatawan asing baik non-Muslim maupun Muslim untuk berkunjung ke Korea Selatan.
2. Menjelaskan mengenai strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan industri halalnya dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Muslim dan menyediakan fasilitas ramah Muslim.
3. Sebagai sarana informasi dan pedoman bagi pembaca dan juga pihak-pihak yang membutuhkan wawasan mengenai industri pariwisata halal di Korea Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan

perhitungan atau dapat diartikan sebagai penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Selain itu, penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009).

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis setelah menentukan metode pengumpulan data yaitu menentukan teknik pengumpulan data yang akan dipakai. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012). Langkah ini sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut dapat digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan.

Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan menelaah setotal literature baik berupa buku, jurnal, dokumen, artikel, makalah, internet, dan website resmi lainnya yang berhubungan dengan masalah utama (Koentjaraningrat, 1983).

3. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian kegiatan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa (Hasyim, 1982). Selain itu, teknik analisis data juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data-data yang sudah didapat ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, diakhiri dengan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi seperangkat hasil yang bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis memberikan suatu batasan jangkauan penelitian yang diambil dengan tujuan agar penelitian tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan serta mempermudah analisis yang akan dilakukan menjadi jelas dan terarah. Dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah pada strategi dan kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan industri pariwisata halalnya. Periode waktu dalam pembahasan ini adalah dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dimana pada tahun 2015 terdapat beberapa data yang menjelaskan bahwa pariwisata di Korea Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun, ditambah pemerintah Korea Selatan mulai fokus terhadap peningkatan jumlah wisatawan Muslim dan lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan wisatawan Muslim. Sedangkan, pada tahun 2020, pariwisata Korea Selatan mengalami kemerosotan lagi karena adanya wabah korona.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat wajib dalam rangka memenuhi kaidah penulisan yang ilmiah. Oleh karena itu, untuk mempermudah membahas persoalan dalam skripsi yang berjudul “Strategi dan Kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Halal (2015-2020)” penulis telah menyusun secara sistematis menjadi lima bab yaitu:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan berisi pembahasan mengenai perkembangan sektor pariwisata di Korea Selatan dan total wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan dari berbagai negara baik negara non-Muslim maupun negara-negara Muslim.

BAB III berisikan penjelasan mengenai perkembangan industri pariwisata dan makanan halal di Korea Selatan dimulai dari sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan dan juga penjelasan mengenai konsep dari industri pariwisata dan makanan halal serta faktor pendukung dan penghambat perkembangan industri halal di Korea Selatan.

BAB IV akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan dan mempromosikan industri pariwisata halal pada tahun 2015-2020.

BAB V berisikan kesimpulan berdasarkan pandangan penulis atas hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penelitian penulis.